



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 95 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 95**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGTENGAH
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

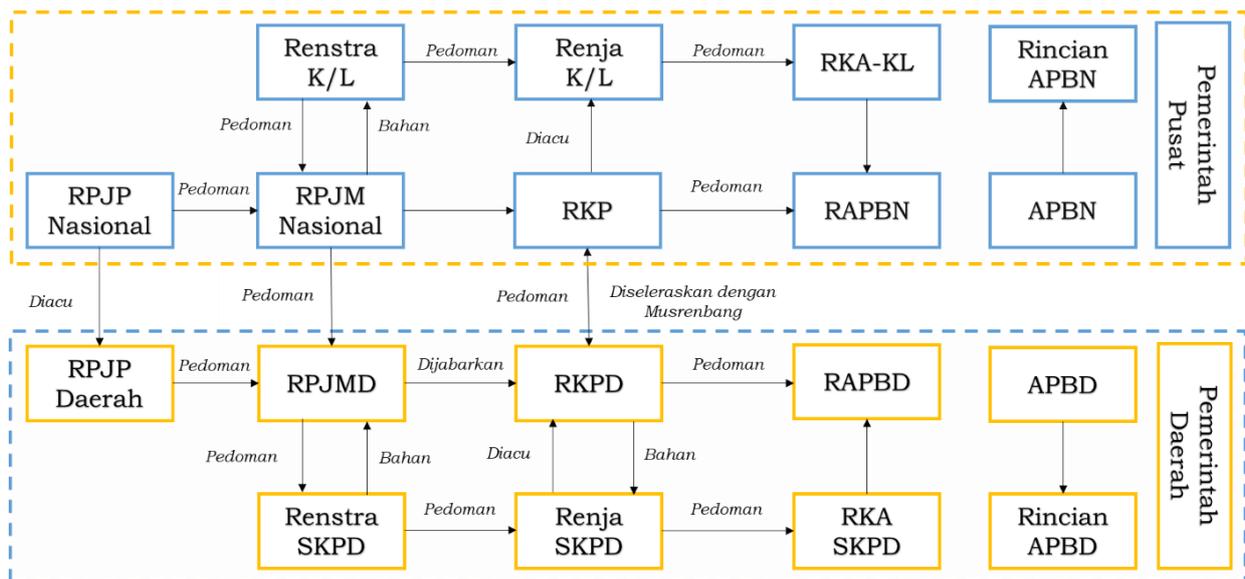
Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKP Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lain



(Sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

Renja SKPD/Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Bahwa Renja SKPD/Kecamatan Karangtengah merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat Kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemic COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemic COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemic COVID-19 . Oleh karena itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman social, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi Covid-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemic saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemik bukan hanya ujian, tetapi juga

peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protocol kesehatan pada semua lini (*new normal*)

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Hasil Pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesimpulan setiap tahunnya maka berdsarakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan dan ditentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu ” **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat** ” yang di turunkan kedalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran Tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan Penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Karangtengah tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangtengah tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Karangtengah guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangtengah tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Karangtengah ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Karangtengah sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang

terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Karangtengah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangtengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Karangtengah selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangtengah Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Sub Kegiatan : penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas

dan fungsi

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub kegiatan : Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi kunjungan tamu
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan
 - 6) Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan : penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub kegiatan : pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yaitu :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

- Sub kegiatan : Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa
 - 2) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan : peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 23 Kegiatan terdapat 13 (Tiga belas) Kegiatan (33,33%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (94 %)
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (98 %)
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,96%)
4. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (99,91%)
5. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (99,86 %)
6. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (98,1 %)
7. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (94,1%)
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (91,14 %)
9. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (54 %)
10. Kegiatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan (89 %)
11. Kegiatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (99,99 %)
12. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (85,28 %)
13. Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (99,82 %)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

NO	Uraian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Realisasi Kegiatan TA.2021	Prosentasi
				Jumlah	(%)
1	2	3	6	8	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.820.222.349	DAU	1.739.609.240	95,57
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.207.832.029		1.134.692.834	94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.200.332.029		1.127.192.834	94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000		14.700.000	98
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000		14.700.000	98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.883.000		190.754.300	99,93
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.881.600		69.854.900	99,96
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.560.000		34.528.000	99,90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.300.000		51.230.000	99,86
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.098.000		252.187.800	98,09
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	257.098.000		252.187.800	98,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.610.200		24.163.386	98,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.540.200		7.093.386	94,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.299.120		115.610.920	98,56
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.666.800		13.367.600	91,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.632.320		102.243.320	99,62
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	252.542.500		229.028.838	90,68
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	211.542.500		188.028.925	88,88
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	211.542.500		188.028.925	88,88

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	41.000.000		40.999.913	99,99
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.000.000		40.999.913	99,99
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.000.000		36.320.000	90,8
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000		21.320.000	85,28
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000		21.320.000	85,28
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0		0	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0		0	0
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.936.500		16.906.500	99,82
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.936.500		16.906.500	99,82
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.936.500		16.906.500	99,82
	JUMLAH	2.176.896.349		2.069.059.578	95,05

Sumber : LRA Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Program tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena faktor tidak terserapnya anggaran

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 23 Kegiatan terdapat 10 (Sepuluh) Kegiatan (66,67%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Rumah Tangga
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan
 10. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

NO	Uraian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Realisasi Kegiatan TA.2021	Prosen tasi
				Jumlah	(%)
1	2	3	6	8	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	7.500.000		7.500.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000		7.500.000	100
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000		3.300.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	13.610.400		13.610.400	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.395.000		13.395.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.836.000		4.836.000	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.570.000		6.570.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.500.000		10.500.000	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000		15.000.000	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	47.195.000		47.195.000	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47.195.000		47.195.000	100

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Karangtengah pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Karangtengah .

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Karangtengah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Karangtengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

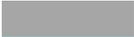
Adapun capaian Renstra Kecamatan Karangtengah tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Karangtengah
Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	
a	B	c	d	e	f	G	h	I	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	82.5	82	99,4	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82.5	82	99,4	
						Kondisi Akhir (F)		82	99,4	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	B	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	

(Sumber : Nilai SKM dan SAKIP Tahun 2021)

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Karangtengah tahun 2021, ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dari Target 100 % pencapaiannya sampai 99,4 % , dikarenakan adanya unsur sarana dan prasarana mesin cetak KTP yang diambil lagi oleh Disdukcapil Garut sehingga masyarakat Kecamatan Karangtengah yang memerlukan KTP harus datang langsung ke Disdukcapil Garut.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakiw kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% Tidak ada
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau kurang target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan Kurang target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga ada sedikit kendala yang dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau kurang dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Karangtengah . Dengan ada target yang belum tercapai, maka perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Karangtengah

Lembar :1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s/d Triwulan 2		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
7		Urusan Wajib										
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan										
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	93 %	100 %	93 %	93 %	100 %	100 %	48,54 %
7	01	01	02.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	49,21%
7	01	01	02.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	49,21 %
7	01	01	02.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat	100 %	94 %	100 %	94 %	100 %	50,2 %

7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	99,99 %	100 %	99,99 %	99,99 %	100 %	100 %	53,96 %
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan	100 %	99,99 %	100 %	99,99 %	99,99 %	100 %	100 %	53,96 %
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	91 %	100 %	91 %	91 %	100 %	100 %	66,50 %
7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	85,28	100 %	85,28	85,28	100 %	100 %	74,88 %
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen RPTK	100%	85,28	100%	85,28	85,28	100%	100 %	74,88%
7	01	03	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,76%
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rapat PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,76%

7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	39,96%	
7	01	04	2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Linmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	49,18 %	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0%
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	19,35 %
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
7	01	06			Program Pembinaan dan	Prosentase	100 %	99,82	100 %	99,82	99,82	100 %	100 %	71,08%

					Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	100 %	99,82	100 %	99,82	99,82	100 %	100 %	58,93 %
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa	100 %	99,82	100 %	99,82	99,82	100 %	100 %	49,57 %

Sumber LRA Tahun 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Karangtengah sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82,5	83	83,5	84	81,18	82	83		
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			73	74	75	80	n/a	73	74		
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			100	100	100	100	100	100	100		
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	CC	CC	B		

(Sumber : Tabel Logis Tahun 2021)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangtengah ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Karangtengah serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Karangtengah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Karangtengah sebesar Rp. 6.384.844.171,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Karangtengah diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Karangtengah mengusulkan 6 (enam) Program dengan 15 (Lima belas) kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Karangtengah mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Karangtengah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				6.384.844.171	KECAMATAN					7.086.778.568
7	01	01			5.486.526.291	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.042.878.920	
7	01	01	2.01		33.275.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.202.500	
7	01	01	2.01	01	27.275.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	36.602.500	

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen	1 Dokumen	1.100.000

						Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1.100.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Laporan	1.000.000	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Laporan	1.100.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.657.478.291	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.823.226.120
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.624.203.291	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.76.623.620

7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	33.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	36.602.500
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	43.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	47.520.000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	3.993.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	4.392.300
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Karang tengah	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Karang tengah	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	33.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	320.593.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	353.752.300
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi	1 Paket	3.993.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi	1 Paket	4.392.300

					angan Bangunan Kantor		Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan			ngan Bangunan Kantor		Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	45 Paket	135.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	45 jenis	148.500.000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	9 Paket	54.450.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	9 Paket	59.895.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecama tan Karang tengah	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	18.150.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecama tan Karang tengah	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	19.965.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1 Dokumen	6.600.000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamü	Kecama tan Karang	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamü	Kecama tan Karang	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	45.100.000	

						tengah	kunjungan tamu				tengah	kunjungan tamu			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	62.000.000	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	68.200.000	
7	01	01	2.06	10	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.100.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	3.338.670.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.907.037.000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecama tan Karang tengah	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 unit	200.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecama tan Karang tengah	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 unit	220.000.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	11 Paket	153.670.000	Pengadaan Mebel	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	11 Paket	169.037.000	

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	1 unit	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	1 unit	77.000.000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	2.805.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1.320.000.000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	110.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	121.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	30.710.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	33.781.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	1 Laporan	9.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	1 Laporan	10.670.000

							disediakan						disediakan				
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	8.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	9.075.000			
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	12.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	14.036.000			
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	62.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.834.360.000			
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	9 unit	17.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	9 unit	19.360.000			

					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan pajaknya			
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	1 unit	45.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karang tengah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	1 unit	1.815.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	352.239.680	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	442.463.648	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	234.139.680	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	312.553.648	

7	01	02	2.01	01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11.000.000	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.100.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Dokumen	223.139.680	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Dokumen	300.453.648
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	118.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	129.910.000

7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	1 dokumen	43.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	1 dokumen	47.300.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.100.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	82.610.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	82.078.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	90.286.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	32.078.200	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	35.286.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	10 Lembaga	16.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	10 Lembaga	18.150.000

					Pembangunan di Desa		Forum			Pembangunan di Desa		Forum			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.578.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	17.136.000	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	55.000.000	
					Penanganan Covid-19 di Tingkat desa dan Kelurahan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat desa dan Kelurahan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	1 Dokumen	55.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	103.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	114.200.000	

7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	81.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	90.000.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	70.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.000.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 Laporan	11.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 Laporan	15.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	1 Laporan	22.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	1 Laporan	24.200.000	

					Daerah		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Daerah		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Koordinasi/s inergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	22.000.000	Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Karangtengah	Jumlah Laporan Koordinasi/s inergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	24,200.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	232.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	255.750.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaera		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	1 Laporan	232.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	1 Laporan	255.750.000

					h		Penugasan Kepala Daerah					Penugasan Kepala Daerah				
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Karangtengah	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	27.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Karangtengah	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	30.000.000		

7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Karang tengah	jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	600 Orang	55.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Karang tengah	jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	600 Orang	65.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Karang tengah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	160.750.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	128.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	141.200.000
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Junlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	12 bulan	128.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Junlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	12 Bulan	141.200.000

							Pemerintah n Desa					Pemerintah n Desa						
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah n Desa	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintah n desa	1 Dokumen	55.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah n Desa	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintah n desa	1 Dokumen	60.500.000				
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarak atan	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarak atan	1 Dokumen	19.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarak atan	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarak atan	1 Dokumen	20.900.000				
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Partisipatif	Kecama tan Karang tengah	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Partisipatif	1 Dokum en	33.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Partisipatif	Kecama tan Karang tengah	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Partisipatif	1 Dokumen	36.300.000				
7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Masyarakat Desa	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa n	1 Dokumen	21.500.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecama tan Karang tengah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa n	1 Dokumen	23.500.000				

						Masyarakat Desa					Masyarakat Desa			
TOTAL								6.384.844.171					7.086.778.568	

(Sumber : Ranwal Renja Tahun 2023)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Karangtengah melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Karangtengah mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Wisata Desa Piramid View	Desa Sindanggalih	Pengembangan Wisata	1 paket	
2	Bantuan sarana peroduksi tanaman jagung	Desa Sindanggalih	Peningkatan Sarana Produksi	1 paket	
3	Peningkatan fasilitas Jalan usaha Tani	Kp.Lampingsari s.d Kp Sukalilah	Prasarana jalan kurang Layak	1,5 KM	
4	Peningkatan Fasilitas Bumdes	Kecamatan Karangtengah/4Desa	Kurangnya Fasilitas Bumdes	1 paket	
5	Peningkatan sarana Produksi Konveksi	Kelompok Konveksi	Kurangnya Sarana Konveksi	1 paket	
6	Peningkatan Pengembangan Budidaya domba	Kp Sinapeul Rt 01 Rw 01	Penguatan Pengembangan Budidaya domba	1 Paket	
7	Peningkatan Pengembangan Budidaya domba	Kp Cibulakan Rt 01 Rw 06	Penguatan Pengembangan Budidaya domba	1 paket	
8	Peningkatan pengelolaan sampah	Kp Nanggewer Rt 01 Rw 05 Desa Cinta	Penguatan pengelolaan sampah	1Paket	
9	Peningkatan perekonomian kelompok usaha	Desa Cinta	Penguatan Kelompok Usaha	1Paket	
10	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha	KUPP Desa Caringin	Penguatan Kelompok Usaha	1paket	

11	Pengelola Bank sampah Rw 001	KP. CIKULAHAN RW 01 Desa Caringin	Penguatan pengelolaan sampah	1 paket	
12	Pelatihan Kerja (PKK)	PKK DESA CARINGIN	Penguatan anggota PKK	25 Orang	
13	Peningkatan UP2K	PKK DESA CARINGIN	Penguatan UP2k	25 Orang	
14	Bantuan Mesin Traktor UPJA	UPJA ALSINTAN "MITRA TANI" (DESA CARINGIN)	Penguatan untuk Kelompok Tani	25 Orang	
15	Padat karya	Kp. Cimasuk Desa Cintamanik, Kab. Garut	Pengembangan Tenaga Kerja diwilayah Desa	25 Orang	
16	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK) (HOK)	Kp. Cikiruh dan Kp. Cileles Desa Cintamanik, Kab. Garut	Pengembangan Tenaga Kerja di Wilayah Desa	25 Orang	
17	Padat karya	Dusun 3 Desa Cintamanik, Kab. Garut	Pengembangan Tenaga Kerja di Wilayah Desa	25 orang	
18	Padat karya	Dusun 1 Desa Cintamanik, Kab. Garut		25 Orang	
19	Peningkatan sarana Olahraga	Desa Cintamanik, Kab. Garut	Pengembangan Tenaga Kerja di Wilayah Desa	1 paket	
20	Peningkatan Fasilitas Sub das	Cihaneut Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Sub Das Cihaneut Cintamanik	1 paket	
21	Peningkatan Fasilitas Sub das	Cibangkong Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Sub Das Cibangkong Desa Cintamanik	1 Paket	
22	Peningkatan Fasilitas Pertanian	Kp. Cinta Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pertanian	1 Paket	
23	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp. Cikiruh Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Permukiman	1 Paket	

24	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Permukiman	1 Paket	
25	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp. Jambudipa Rt. 006 Rw. 004 Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Permukiman	1 Paket	
26	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp. Cibeber Rt. 005 Rw. 004 Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Permukiman	1 Paket	
27	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp. Cimasuk Rt. 004 Rw. 006 Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Permukiman	1 Paket	
28	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp. Ancol RW 02 dan RW 06 Blok Lebak Leles, Desa sindanggalih Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Permukiman	1 Paket	
29	Peningkatan Jaringan irigasi	Das Citameng 1 Kp. Jumre Rt 01 Rw 06, Desa Caringin Kab. Garut	Penguatan Jaringan Irigasi	1 Paket	
30	Peningkatan PJU Jalan	Kecamatan Karangtengah/4Desa	Penguatan Fasilitas Umum	1 Paket	
31	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	KP. Cikulahan RW 01, Desa Caringin Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Permukiman	1 Paket	
32	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	KP Ragadiem Rt 04 Rw 01,Desa Cinta Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pemukiman	1 paket	
33	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp Mekarsari Rt 03 Rw 06, Desa Cinta Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pemukiman	1 paket	
34	Peningkatan Fasilitas Infrastruktur	Kp Ragadiem Rt 04 Rw 01, Desa Cinta Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pemukiman	1 paket	
35	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp Ragadiem Rt 04 Rw 01, Desa Cinta Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pemukiman	1 paket	
36	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp Cinpa Pasir Rt 01 Rw 01, Desa CintaKab. Garut	Penguatan Fasilitas Pemukiman	1 paket	

37	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp Cinta Pasir Rt 01 Rw 01, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pemukiman	1 paket	
38	Peningkatan Fasilitas Pemukiman	Kp Kupaluwuk Rt 04 Rw 05, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pemukiman	1paket	
39	Rehabilitasi Tanggul Sub Das	SUB Das Irigasi Citameng 1, Kab. Garut	Penguatan Infrastruktur	1 paket	
40	Peningkatan Fasilitas Infrastruktur	Jalan Kabupaten Sukawening-Karangtengah Kp. Ancol RW 02	Penguatan Fasilitas Infrastruktur	1 paket	
41	Peningkatan Fasilitas Infrastruktur	Dusun 3 Kp. Jumre Rt 01 Rw 06	Penguatan Fasilitas Infrastruktur	1 paket	
42	Peningkatan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Saluran Air Cihurang Kp. Lewad Rw 02, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Infrastruktur	1 Paket	
43	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Saluran Irigasi Nusa (Kp. Gertengah Rw 04), Kab. Garut	Penguatan Jaringan Irigasi	1 paket	
44	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Pangsor KP. Cihanja I Rw 07, Kab. Garut	Penguatan Jaringan Irigasi	1paket	
45	Peningkatan Fasilitas Infrastruktur	Dusun 2 Kp. Gertengah Rw 04	Penguatan Fasilitas Infrastruktur	1paket	
46	Peningkatan Fasilitas Infrastruktur	Jalan Kabupaten Sukawening-Karangtengah	Penguatan Fasilitas Infrastruktur	1 paket	
47	Kepumudaan dan Olahraga	Kp. Sangojar RW 01, Kab. Garut Desa Sindanggalih	Penguatan Kepumudaan dan Olahraga	1 Paket	
48	Pendidikan Non Formal	PAUD AL HADID Kp. Ancol RW 08,Desa Sindanggalih Kab. Garut	Peningkatan Fasilitas Pendidikan Non Formal	1 paket	
49	Pendidikan Non Formal	TK MEKARSARI Kp. Ancol RT 003 RW 02, Kab. Garut	Peningkatan Fasilitas Pendidikan Non Formal	1 paket	

50	Pengadaan Alat Tenis Meja	Desa Sindanggalih	Penguatan Sarana Olahraga	1 unit	
51	Peningkatan sarana Olahraga	Kp. Ancol RW 08 Desa Sindanggalih, Kab. Garut	Penguatan Sarana Olahraga	1 Paket	
52	Peningkatan sarana Olahraga	Kp. Bbk. Cikacang RW 09, Desa SindanggalihKab. Garut	Penguatan Sarana Olahraga	1 Paket	
53	Peningkatan sarana Olahraga	Kp. Caringin RW 11, Kab. Garut	Penguatan Sarana Olahraga	1 Paket	
54	Peningkatan sarana Olahraga	Pembangunan Lapang Volly	Penguatan Sarana Olahraga	1 paket	
55	Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji	Desa Sindanggalih, Kab. Garut	Penguatan Kapasitas Guru Ngaji	1 paket	
56	Peningkatan sarana Sekretariat RW	Desa Sindanggalih, Kab. Garut	Penguatan sarana Sekretariat RW	1 Paket	
57	Peningkatan fasilitas Pendidikan	TK PGRI Mekarsari Kp. Ancol RW 02, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Infrastruktur Pendidikan	1 paket	
58	Peningkatan fasilitas Gedung Pos Yandu	Dusun 1, Dusun 2 Dusun 3 Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Infrastruktur Gedung Pos Yandu	1 Paket	
59	Peningkatan fasilitas Olahraga	Desa Cintamanik, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Olahraga	1 Paket	
60	Peningkatan Fasilitas kearsipan	Desa Sindanggalih, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Kerarsipan	1 paket	
61	Peningkatan fasilitas Pendidikan	TK Mekarsari Kp. Ancol RT 003 RW 02, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pendidikan	1 paket	
62	Peningkatan fasilitas Pendidikan	Kober Rhaudhathul Jannah KP. Jumre Rt 01 Rw 06, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pendidikan	1 paket	

63	Pengadaan HT Untuk Rt dan RW	Desa Cinta	Penguatan Komunikasi antar RW RT	1 Paket	
64	Pengadaan Komputer Untuk Desa	Desa Cinta	Penguatan Fasilitas Peralatan Kantor	1 paket	
65	Insentif Limnas	Desa Cinta	Penguatan Insentif Linmas	30 Orang	
66	Peningkatan fasilitas Pendidikan	Kp. Jumre Rt 01 Rw 06, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Pendidikan	1 Paket	
67	Peningkatan fasilitas ibadah	Kp Legok Rt 06 Rw 07, Kab. Garut	Penguatan Fasilitas Ibadah	1 paket	

(Sumber : Hasil Musrenbang Tahun 2022)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahuan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
5. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
6. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Karangtengah mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja
Kecamatan Karangtengah
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Karangtengah merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Karangtengah sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan

di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Karangtengah diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Karangtengah merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Karangtengah diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar,

ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Karangtengah. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Karangtengah diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Karangtengah sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan Bunga, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, kerupuk Jagung, Emping Jagung, Sistik, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Desa Wisata Babakan Cikacang, Gunung Piramid, Karaha

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Karangtengah sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Karangtengah dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp.6.384.844.171,-.

Adapun Program Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangtengah pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- 1.2.5 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.2.6 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Pengadaan Mebel
- 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

- 1.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait
 - 2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- 3.1.2 peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3.2 Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 - 3.2.1 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat
- 6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- 6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini :

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01						6,384,844,171						7,086,778,568							
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	persen		persen	100 persen	5,486,526,291				100 persen	6,042,878,920			
7	01	01	2.01			Perencanaan , Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	33,275,000				100 %	43,202,500			
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	27,275,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	36,602,500	Kecam atan Karang tengah
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	1,100,000	Kecam atan Karang tengah
7	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	1,100,000	Kecam atan Karang tengah
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	1,100,000	Kecam atan Karang tengah

7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	1,100,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	1,100,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,657,478,291						1 Laporan	1,823,226,120	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bul	1,624,203,291	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	10 Orang/bul	1,786,623,620	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	33,275,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	36,602,500	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket		Paket	17 Paket	43,200,000						17 Paket	47,520,000	

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	13,200,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	17 Paket	14,520,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	30,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	6 Orang	33,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	320,593,000						1 Laporan	353,752,300	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,993,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Paket	4,392,300	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	135,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	45 Paket	148,500,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	54,450,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	9 Paket	59,895,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan yang Disediakan				2 Paket	18,150,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	2 Paket	19,965,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	6,600,000	Kecamatan Karangtengah

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	40,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	45,100,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	62,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	68,200,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	3,338,670,000						1 Laporan	1,907,037,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 unit	200,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	5 unit	220,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	153,670,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	11 Unit	169,037,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	70,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Unit	77,000,000	Kecamatan Karangtengah

7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2,805,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Unit	1,320,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	110,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Unit	121,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	30,710,000						1 Laporan	33,781,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9,700,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	10,670,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan				1 Laporan	8,250,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	9,075,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2,805,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Unit	1,320,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12,760,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	14,036,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	62,600,000						1 Laporan	1,834,360,000	

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	17,600,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	9 Unit	19,360,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	45,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Unit	1,815,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	persen		persen	100 persen	352,239,680						100 persen	442,463,648	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	234,139,680						1 Laporan	312,553,648	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait				1 Laporan	11,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	12,100,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	223,139,680	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	300,453,648	Kecamatan Karangtengah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakanoleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	118,100,000						1 Laporan	129,910,000	

7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	43,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	47,300,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	75,100,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	82,610,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	persen		persen	100 persen	82,078,200						100 persen	90,286,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	bulan		bulan	12 bulan	32,078,200						12 bulan	35,286,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga	16,500,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	10 Lembaga	18,150,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	43,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	47,300,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15,578,200	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	17,136,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%		%	100 %	50,000,000						100 %	55,000,000	

7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	55,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganangangguan Trantibum	persen	persen	100 persen		103,000,000						100 persen	114,200,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	bulan	bulan	12 bulan		81,000,000						12 bulan	90,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	70,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	75,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	11,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Laporan	1 Laporan		22,000,000						1 Laporan	24,200,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	22,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Laporan	24,200,000	Kecamatan Karangtengah

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	persen		persen	100 persen	232,500,000						100 persen	255,750,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	232,500,000						1 Laporan	255,750,000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	27,500,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	400 Orang	30,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				600 Orang	55,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	600 Orang	65,000,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	160,750,000	Kecamatan Karangtengah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	persen		persen	100 persen	128,500,000						100 persen	141,200,000	

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	bulan		bulan	12 bulan	128,500,000						12 bulan	141,200,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	55,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	60,500,000	Kecamatan Karangtengah	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	19,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	20,900,000	Kecamatan Karangtengah	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	33,000,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	36,300,000	Kecamatan Karangtengah	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	21,500,000	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Karangtengah	1 Dokumen	23,500,000	Kecamatan Karangtengah	
TOTAL											6,384,844,171								7,086,778,568	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Karangtengah Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut sebesar Rp. 6.384.844.171,- (Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.486.526.291,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Capaian Kegiatan : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 33.275.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD.
 4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
 7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah.
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.657.478.291,-
- Keluaran : 1. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 43.200.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 320.593.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.
4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.
5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
6. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu.
7. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
8. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.338.670.000,-

Keluaran : 1. Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan.
2. Jumlah Paket mebel yang disediakan.
3. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan.
4. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan.
5. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 30.710.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 62.600.000,-
Keluaran : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp.352.239.680 ,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 234.139.680,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait.
2. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit

Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 118.100.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
2. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakatndi wilayah Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 82.078.200,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
2. Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 32.078.200,-

Keluaran : 1. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

3.2 Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Capaian Program : Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 103.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 74

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 81.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 74

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 22.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 74

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 232.500.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 74

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana 232.500.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek , Sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
3. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 74

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 128.500.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 74

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 128.500.000,-

- Keluaran : 1. Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga.
3. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan Pembangunan Partisipatif
4. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 74
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangtengah

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 6.384.844.171,- Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Karangtengah . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Karangtengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Karangtengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UN	SU	R KEWILAYAHAN													
7	01	KE	CA	MATAN													
7	01	01	PR	OG	RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7	01	01	2,01	Peren	canaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	75 Poin	27.275.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	36.602.500
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	75 Poin	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.100.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	75 Poin	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.100.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	75 Poin	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.100.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	75 Poin	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.100.000

7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 Poin	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.100.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 Poin	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.100.000
7	01	01	2,02	Adm	inistrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.657.478.291				1.823.226.120
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	10 Orang/bula	n75 Poin	1.624.203.291	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.786.623.620
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 Poin	33.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	36.602.500
7	01	01	2,05	Adm	inistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								43.200.000				47.520.000
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	17 Paket	75 Poin	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	14.520.000
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	6 Orang	75 Poin	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	33.000.000
7	01	01	2,06	Adm	inistrasi Umum Perangkat Daerah								320.593.000				353.752.300
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Paket	75 Poin	3.993.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	4.392.300

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	45 Paket	75 Poin	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	148.500.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	9 Paket	75 Poin	54.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	59.895.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	2 Paket	75 Poin	18.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	19.965.000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	75 Poin	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	6.600.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 Poin	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	45.100.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	75 Poin	62.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	68.200.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	75 Poin	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.100.000
7	01	01	2,07	Peng	adaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.338.670.000				1.907.037.000
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	5 unit	75 poin	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	220.000.000

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	11 Unit	75 poin	153.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	169.037.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Unit	75 poin	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	77.000.000
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Unit	75 poin	2.805.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.320.000.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Unit	75 poin	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	121.000.000
7	01	01	2,08	Peny	ediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							30.710.000					33.781.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 Poin	9.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	10.670.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 Poin	8.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	9.075.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 Poin	12.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	14.036.000
7	01	01	2,09	Peme	lihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							62.600.000					1.834.360.000
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	9 Unit	75 Poin	17.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	19.360.000

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Unit	75 Poin	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 persen	1.815.000.000
7	01	02	PR	OG	RAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								352.239.680		442.463.648		
7	01	02	2,01	Koor	dinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								234.139.680		312.553.648		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	83 poin	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 persen	12.100.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	83 poin	223.139.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 persen	300.453.648
7	01	02	2,02	Peny	elenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								118.100.000		129.910.000		
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Dokumen	83 Poin	43.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 persen	47.300.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	83 Poin	75.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 persen	82.610.000
7	01	03	PR	OG	RAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								82.078.200		90.286.000		
7	01	03	2,01	Koor	dinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								32.078.200		35.286.000		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	10 Lembaga	100 Persen	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 persen	18.150.000

7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	100 Persen	15.578.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 persen	17.136.000
7	01	03	2,05	Koor	dinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								50.000.000			55.000.000	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 %	1 Dokumen	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	55.000.000
7	01	04	PR	OG	RAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								103.000.000			114.200.000	
7	01	04	2,01	Koor	dinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								81.000.000			90.000.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 nilai	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100 persen	75.000.000
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 nilai	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100 persen	15.000.000
7	01	04	2,02	Koor	dinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								22.000.000			24.200.000	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penanganan gangguan trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih	100 persen	1 Laporan	75 nilai	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	100 persen	24.200.000
7	01	05	PR	OG	RAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								232.500.000			255.750.000	
7	01	05	2,01	Peny	elenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								232.500.000			255.750.000	

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Karangtengah mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Karangtengah menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Karangtengah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN